

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Saat ini permasalahan dunia paling genting adalah mengatasi krisis iklim. Masifnya perubahan yang terjadi pada lingkungan menimbulkan berbagai permasalahan dan penyelesaiannya pun tidak mudah. Dewan-dewan dunia kemudian banyak melakukan konferensi, perjanjian, dan upaya lainnya, sebagai bentuk penyelamatan bumi. Salah satunya terbentuk sebuah rezim lingkungan yaitu REDD. Ide di balik REDD mungkin sederhana, tetapi pada praktiknya menyembunyikan sejumlah tantangan. Misalnya, haruskah pemerintah nasional, masyarakat lokal dan penghuni hutan atau perusahaan penebangan mendapat manfaat dari pembayaran REDD. Tantangan-tantangan besar tersebut dapat diatasi dengan solusi teknis, tetapi perlu didukung oleh tata kelola yang baik dan pembuatan kebijakan secara efektif, di mana hal tersebut mungkin lebih menantang daripada solusi teknis itu sendiri. Penulis hendak membuktikan sendiri apakah benar REDD efektif atau tidak dalam membantu negara-negara berkembang mengurangi deforestasi dan degradasi hutan mereka untuk mencapai *zero emission*.

1.2 Latar Belakang Masalah

Negara-negara dengan potensi hutan yang besar dan luas, rentan mengalami deforestasi untuk peralihan lahan sebagai upaya pembangunan nasional. Brazil adalah negara dengan luas kawasan hutan terbesar kedua di dunia. Kegiatan deforestasi di Amazon, Brazil sendiri sudah berlangsung sejak akhir tahun 1960-an, ketika pemerintah militer Juscelino Kubitschek mulai mensponsori program pembangunan berskala besar sebagai bentuk dukungan kolonisasi wilayahnya (Butler, 2009). Perencanaannya sendiri berawal dari tahun 1956 di mana Juscelino ingin membangun Brazil menjadi sebuah perkotaan dengan menggabungkan gagasan administrasi dan ruang publik. Program pembangunan Juscelino

dicanangkan untuk menyediakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan membangun peradaban nasional di daerah pedalaman, kemudian menawarkan pinjaman bersubsidi kepada mereka yang menetap serta berprofesi sebagai peternak, dan mensponsori proyek jalan tol Trans-Amazonian (Butler, 2009). Sebanyak 73% dari sabana dihancurkan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan, area bisnis, perumahan serta pusat perbelanjaan, dan infrastruktur transportasi (World Rainforest Movement, 2023). Upaya penggundulan hutan menjadi semakin masif ketika pemerintahan Brazil di awal tahun 1970-an berganti kepada Emilio Garrastazu Médici. Médici mengeluarkan sebuah program bernama *National Integration Plan*. Program tersebut memiliki tiga tujuan yaitu, pembangunan infrastruktur berskala besar, utamanya adalah pembangunan jalan raya (Transamazonian atau BR-230), kolonisasi wilayah oleh petani skala kecil dengan pengalihfungsian lahan meliputi wilayah selatan dan tepi timur Brazil, dan program insentif fiskal yang memungkinkan perusahaan-perusahaan berinvestasi di Amazon sebagai bagian dari wajib pajak, serta mendorong pembangunan ekonomi yang sejalan dengan moto 'mengintegrasikan Amazon ke seluruh Brazil agar tidak kehilangan kepentingan asing' (Tourneau, 2016). Transamazonian digadang akan menjadi benteng perlindungan keamanan nasional Brazil. Pemerintah militer menganggap Amazon sebagai lahan kosong yang mudah disusupi sehingga memerlukan perlindungan. Sedangkan kenyataannya lahan tersebut sedari awal sudah dihuni oleh ribuan pribumi, masyarakat tradisional. Pada akhirnya mereka terpaksa disingkirkan, dicabut hak-haknya, bahkan dibunuh ketika berusaha memperjuangkan dan menolak adanya pembangunan dari para militer. Bagi pemerintah, kehadiran pribumi adalah sebuah ancaman kedaulatan dan penghambat kemajuan Brazil (Speetjens, 2020). Kediktatoran dari pemerintah Brazil terus berlangsung hingga tahun 1985, berbagai proyek berlangsung semakin memperkuat ketahanan negara kolonial tersebut. Namun, dampak dari penguasaan besar-besaran yang telah terjadi menghancurkan kehidupan entitas didalamnya, terlebih wilayah milik masyarakat adat, semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi dan politik negara. Militerisasi Brazil berhasil membuka ruang terbuka bagi para investor utamanya, demi mencapai keuntungan kaum elit tanpa mengindahkan

bahwasanya mereka telah membunuh kebudayaan, ekologi, dan adat, dengan mengubahnya menjadi masyarakat modern (World Rainforest Movement, 2023).

Berdasarkan data *Forest Area World Bank*, pada tahun 1990 luas hutan Brazil sebesar 5.888.980 juta hektar (World Bank). Namun, memasuki tahun 2000 dan 2008, lebih dari 150.000 km/seginya hutan hujan Amazon Brazil hilang akibat penebangan (Butler, 2009). Hingga tahun 2020 lalu, penurunan sebesar 922.784 ribu hektar telah terjadi. Kembali ditunjukkan oleh *forest area World Bank*, sisa luas hutan Brazil pada tahun 2020 seluas 4.966.196 juta hektar (World Bank). Pada akhirnya, sebagai wilayah hutan hujan terbesar dunia, Brazil juga menjadi penyumbang peningkatan pemanasan global terbesar melalui emisi gas rumah kacanya yaitu sebesar 15% (BBC Indonesia, 2018).

Deforestasi sendiri melambangkan sebuah peristiwa hilangnya hutan alam dengan atributnya, akibat dari penebangan untuk dimanfaatkan kayunya guna mengubah lahan hutan menjadi non-hutan (Himatan, 2020). Menurut FAO, deforestasi adalah hilangnya kawasan hutan secara permanen atau sementara (Suyadi, 2013). Tingkat deforestasi di abad 21 sangatlah tinggi, hal tersebut sehubungan dengan meningkatnya permintaan lahan untuk pembukaan tanah pertanian, pertambangan, dan pemukiman. Selain itu terdapat penyebab lain deforestasi terjadi diantaranya, kebakaran hutan, *illegal logging*, atau produksi kayu yang berasal dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (Himatan, 2020). Tentunya kegiatan deforestasi memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, selain hilangnya daerah resapan air, penggundulan terhadap hutan-hutan mampu menyebabkan kegersangan, dan hal tersebut dapat memengaruhi perubahan iklim dengan meningkatnya suhu udara. Apabila daerah resapan air hilang, maka saat terjadi hujan berskala besar mampu mengakibatkan erosi. Sudah banyak korban dirugikan dari kegiatan deforestasi terutama satwa liar, di mana mereka kehilangan habitat asli atau tempat mereka tinggal serta berlindung. Pengalihan fungsi hutan tersebut mayoritas dilakukan oleh aktor swasta. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi, tanpa menghiraukan makhluk hidup lainnya, dan cenderung lepas tanggung jawab.

Sejatinya pemberitaan terkait krisis iklim masih tertinggal jauh dari isu-isu arus utama layaknya konflik negara, keamanan, perihal kepentingan korporat dan lainnya. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika suhu bumi mengalami peningkatan, disitulah bencana-bencana mulai timbul. Pemanasan global berpotensi meningkatkan panas suhu bumi sehingga pada akhirnya mengakibatkan perubahan iklim yang tidak dapat diterka. Banyak pihak menganggap masalah lingkungan adalah isu jauh yang terbentang di masa depan, oleh karenanya urgensi terhadap hal tersebut masih kurang. Sedangkan pada kenyataannya sudah banyak dirasakan darurat krisis iklim, di mana urgensi terkait mitigasi perubahan iklim menjadi sangat mendesak diperlukan. Maraknya pemanfaatan hutan sebagai alih fungsi lahan untuk bahan produksi manusia menciptakan pecahan-pecahan bagi batas bumi, dengan berujung pada ancaman kelangkaan keanekaragaman hayati dan kesempatan bumi untuk mengembangkan, serta memperbarui seluruh isinya bagi keberlangsungan hidup segenap makhluk di dalamnya. Berdasarkan penjelasan dari buku Fred Magdoff dan John Bellamy Foster, bahwa terjadinya konversi hutan hujan Amazon yang dirubah menjadi lahan pertanian dapat beralih menjadi savana semi gersang. Selain itu, dikutip oleh Magdoff dan Foster melalui website FAO bahwa perkebunan sawit di Asia Tenggara menyumbang sebesar 25% pelepasan CO₂ di bumi, sehingga berakibat pada kehancuran hutan tropis dan menggusur masyarakat adat asli hutan (Lingkungan hidup dan kapitalisme : sebuah pengantar / Fred Magdoff, John Bellamy Foster ; diterjemahkan oleh Pius Ginting, 2018, p. 18). Perkembangan dunia digital dari manusia melahirkan berbagai kecanggihan yang menjadi bumerang bagi lingkungan hidup, di mana dampaknya bukan lagi kepada penurunan ekologi di taraf lokal, regional, tetapi menjadi tingkat global.

Kapitalisme dalam pemerintahan yang berkedok sebagai organisasi atau pemerhati lingkungan, kerap menawarkan solusi bagi persoalan lingkungan karena menurut mereka adanya kebijakan dan teknologi-teknologi mampu memberikan alternatif yang efektif. Namun, menurut John Kenneth Galbraith (2004) hal tersebut hanyalah *innocent fraud* atau tipu muslihat, di mana para kapitalisme memiliki fantasi, bahwa kekuatan pasar dengan berbagai regulasi serta insentif

memungkinkan keajaiban terjadi. Persaingan utama terkait permasalahan lingkungan adalah dengan para kapitalisme. Berbagai persoalan dominan muncul, terlebih apabila berkaitan atas penggunaan lahan, sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan ekonomi milik mereka. Kelompok negara besar selalu menjatuhkan target pasar mereka ke negara-negara berkembang karena sebagian besar kekayaan bumi dimiliki oleh negara berkembang. Seperti melimpahnya sumber daya, baik alam ataupun manusia yang tentunya dapat diperoleh dengan harga rendah. Bagi negara dunia ketiga besarnya kekuasaan para korporat sulit untuk ditentang sehingga berakhir menjadi sebuah tekanan. Sejatinya terdapat banyak angan-angan terkait penanganan lingkungan menggunakan kebijakan-kebijakan yang dapat memecahkan permasalahan iklim. Sedangkan pada kenyataannya, kebijakan yang telah disusun tersebut beberapa belum terlaksana, beberapa sudah terlaksana tetapi tidak membuahkan hasil. Contoh dari kegagalan kebijakan pemerintah terkait lingkungan adalah *food estate*. Di samping itu sistem ekonomi dunia juga menjadi pendorong kuat penghancur ekologi, pasalnya negara *super power* menjadi kiblat bagi negara-negara dunia ketiga untuk turut serta meningkatkan perekonomian mereka melalui kegiatan-kegiatan industri, sedangkan standarisasi dari negara besar tersebut terus meningkat. Kemusnahan semesta pun menjadi di depan mata. Buah dari berbagai kegagalan dalam penanganan krisis lingkungan tersebut pada akhirnya membuat pandangan umum skeptis bahwa semuanya sudah terlambat, dan tentunya akan berdampak buruk bagi kebijakan perbaikan lainnya di masa depan akibat tidak adanya dukungan.

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) sebagai mitra terkait kehutanan dan iklim PBB, hadir untuk membantu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan stok karbon hutan di dunia. REDD pertama kali hadir pada perundingan protokol Kyoto tahun 1997, di mana saat itu negara-negara mulai menyadari dampak kerusakan lingkungan semakin meningkat dan melihat betapa pentingnya hutan sebagai sumber utama dalam mengurangi emisi karbon dari deforestasi. Rencana dari REDD sendiri adalah meningkatkan komitmen masyarakat internasional untuk mengurangi deforestasi. Momentum COP14, di Pozna tahun 2008, menghasilkan perluasan

REDD menjadi REDD+ yang mencakup peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang (CIFOR, n.d.). Komitmen dari REDD+ yaitu mendukung pembangunan baru dengan berpihak pada masyarakat miskin, dan membantu melestarikan keanekaragaman hayati serta mengamankan ekosistem yang vital. Secara berturut-turut melalui COP15 tahun 2009, dan COP16 tahun 2010, telah menghasilkan kesepakatan internasional terkait kerangka kerja REDD+ serta komitmen beberapa negara berkembang untuk mengurangi emisi secara keseluruhan (CIFOR, n.d.). Kesepakatan tersebut mendesak seluruh negara dunia untuk mengadopsi kebijakan publik yang ada sebagai bentuk upaya penghapusan tindakan-tindakan pemicu deforestasi, melalui insentif praktik penggunaan lahan yang baik, seperti pengelolaan hutan berkelanjutan, dan melalui penghapusan subsidi berbahaya (Gebara M. L., 2014). Melihat keadaan hutan Brazil yang semakin memburuk, REDD hadir di Brazil untuk membantu pemerintah melalui kebijakan serta dana mereka, sehingga diharapkan mampu memulihkan kembali hutan Brazil yang hilang akibat deforestasi. Bersama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat di Brazil, REDD+ hendak mewujudkan *zero carbon* melalui bantuan insentifnya. Sejak tahun 2011 penerapan REDD terlihat adanya progres yang berjalan hingga beberapa tahun kedepannya. Namun, selama perjalanannya terdapat berbagai tantangan sehingga mengakibatkan pelaksanaan REDD mengalami berbagai dinamika. Maka dari itu penelitian ini hendak mengetahui sejauh mana efektivitas REDD pada rentang tahun 2015-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari pembahasan di awal, maka penulis memiliki permasalahan utama yang akan diteliti lebih jauh, yaitu pertanyaan tentang “Bagaimana efektivitas dari Implementasi REDD di Brazil tahun 2015-2020?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis teknik penelitian berupa deskriptif analitik. Adapun menggunakan teknik deskriptif analitik ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kebijakan dan bantuan insentif bagi perlindungan kawasan hutan Brazil
2. Mengetahui peluang keberhasilan kebijakan REDD di Brazil
3. Mengetahui efektivitas dari pengimplementasian REDD di Brazil tahun 2015-2020

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari adanya penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan terkait penerapan suatu kebijakan di sebuah negara.
2. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kerja sama antara suatu negara dengan sebuah perjanjian dari organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan global.
3. Bagi Akademisi Amikom Yogyakarta, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur tambahan di perpustakaan yang berhubungan dengan politik-ekonomi, dan kerja sama internasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebagai alternatif untuk memudahkan dalam mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka hendaknya akan disajikan dengan membaginya menjadi lima bab. Pada bagian pertama atau Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan lingkungan yang hingga akhirnya menjadi perhatian besar dunia karena besarnya ancaman akibat dari kerusakan lingkungan bagi keberlangsungan masa depan kehidupan makhluk hidup dan penjabaran terkait REDD. Bab II akan membahas penggunaan Teori Efektivitas Rezim milik Arild Underdal dalam menilik bagaimana nantinya efektivitas dari REDD, menggunakan komponen *output*, *outcome*, dan *impact*. Selanjutnya akan dilampirkan juga beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam mengerjakan penelitian ini, kemudian penjelasan terkait kerangka pemikiran sebagai susunan dalam menjawab

rumusan masalah yang ada. Memasuki Bab III yaitu metode penelitian, di mana penulis menggunakan teknik penelitian berupa deskriptif analitik karena penelitian ini bersifat kualitatif, untuk pengumpulan data nantinya akan menggunakan data-data sekunder dan riset dari dokumen-dokumen terdahulu. Pada Bab IV memasuki bagian pembahasan maka akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang, a) identifikasi pengaruh kebijakan dan bantuan insentif bagi perlindungan kawasan hutan Brazil, b) identifikasi peluang keberhasilan kebijakan REDD di Brazil, dan c) mengetahui efektivitas dari pengimplementasian REDD di Brazil tahun 2015-2020. Pembahasan akan mengacu pada komponen *output*, *outcome*, dan *impact*, sehingga nantinya dapat menemukan kategori yang tepat bagi penggolongan Efektivitas dari REDD sebagai rezim internasional. Bab V akan menjadi bagian akhir dengan berisikan kesimpulan dan penutup menyeluruh atas hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah diteliti.

